

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

Naskah publikasi dengan judul :

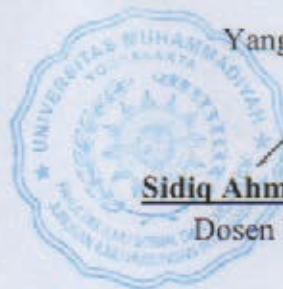
**UPAYA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM MENANGANI  
KONFLIK MORO FILIPINA SELATAN 2015-2017**

Disusun Oleh :

**ADE FITRA SANDRIA**

**20140510263**

Yang Disetujui



**Sidiq Ahmadi, S.IP., M.A.**

Dosen Pembimbing

## **ABSTRACT**

Konflik moro merupakan konflik yang sudah mengintai di selatan Filipina, konflik yang sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu, pada awalnya konflik ini merupakan konflik intern antar pemerintah Filipina dan suku moro namun lama-kelamaan konflik ini menjadi sorotan mata dunia internasional. OKI melakukan upaya penuh dalam kejadian tersebut, OKI mengupayakan pertemuan tripartit antar kedua belah pihak pasca kejadian tersebut dimana pertemuan tersebut antara MILF, Pemerintah Filipina dan OKI. Pasca pertemuan tripartit yang diadakan beberapa kali ini konflik juga tidak lantas mereda, pada tahun 2012 terjadi serangan bersenjata kembali di Cotabato City dan membuat OKI terus melakukan upaya kembali untuk mencari perdamaian yang abadi antara kedua belah pihak ini sendiri.

Pada tahun 2015 menjadi sejarah terkelam di Mindanao dengan tewasnya 44 komando polisi yang bentrok dengan pemberontak di selatan Filipina. (BBC, 2015). Hal ini membuat OKI kembali bergerak dalam konflik ini, sebagai organisasi yang turut serta menjaga perdamaian di selatan Filipina OKI mengirimkan dutanya untuk perundingan dengan kedua belah pihak agar kejadian ini tidak berkepanjangan.

Pada tahun 2017 OKI masih mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak karena OKI masih dianggap dunia Internasional dikarenakan keberhasilan menciptakan Final Peace Agreement. Pendekatan kepada kedua belah pihak dilakukan oleh OKI dimana OKI mengutus dutanya untuk berunding dengan presiden Duterte guna melaksanakan perundingan untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak dengan mengadakan sidang di Abidjan Pantai Gading tahun 2017. (cooperation, 2017)

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang bersifat antarpemerintahan, organisasi ini merupakan organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-bangsa dengan beranggotakan

57 negara<sup>1</sup>tersebar lebih dari empat benua.ini adalah suara kolektif dunia Muslim. Organisasi ini berupaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian internasional dan harmoni antara berbagai orang di dunia.Organisasi ini didirikan berdasarkan keputusan KTT sejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijra (25 September 1969) setelah pembakaran kriminal dari Masjid Al-Aqsa di pendudukan Yerusalem. OKI sendiri memiliki prinsip Organisasi yang pada dasarnya untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara-negara terutama negara Muslim.<sup>2</sup>

OKI sebagai organisasi yang dibentuk oleh negara-negara islam bergerak dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan perdamaian. Perdamaian yang selama ini diupayakan oleh OKI salah satunya yaitu Palestina dan Israel. Selain itu masih ada contoh lain upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh OKI, salah satunya yakni konflik di Mindanao yakni antara penduduk muslim Moro dan Pemerintah Filipina. Di konflik ini OKI sebagai organisasi yang menjunjung solidaritas terhadap umat muslim muncul untuk menjadi mediator dalam konflik ini. OKI pada awal mulanya diminta oleh pemimpin MNLF untuk menjadi mediator dalam konflik ini dan OKI dibantu dengan PBB untuk menyelesaikan permasalahan karena OKI dianggap organisasi Islam dan lebih bias diterima masyarakat moro dalam menyelesaikan konflik yang sudah berangsur sejak lama.

Di sisi lain OKI disini muncul bukan karena hanya solidaritas sesama umat muslim melainkan konflik Mindanao juga di intervensi oleh pihak luar yang mencari kesempatan dalam konflik ini. tindakan suku Moro dianggap oleh beberapa pihak di dunia Internasional sebagai separatisme Islam, seperti contohnya Amerika Serikat langsung mengintervensi konflik ini dengan berpihak pada Pemerintahan Filipina karena Suku Moro sendiri dianggap sebagai separatisme. diskursus separatisme dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep legitimasi atau kekuasaan terhadap pemerintah yang berkuasa.pemikiran tersebut sudah lama dikembangkan oleh pemikir-pemikir islam klasik seperti al-Ghazali, al-Mawardi, ataupun Ibn Taimiyyah.(Surwandono & Ahmadi, 2011)

Suku Moro sendiri adalah penduduk muslim asli yang berdiam di Mindanao, Filipina Selatan. Penduduk muslim di Mindanao atau suku Moro ini hidup dengan menerapkan norma-norma dan hukum islam yang sudah diterapkan sejak dahulu. Konflik Mindanao sendiri merupakan konflik yang muncul di abad ke 15 dari perlawanan Penduduk Mindanao terhadap kolonialisasi pemerintah Spanyol ketika berhasil menguasai Kepulauan Luzon dan hendak memperluas daerah kekuasaan ke selatan Filipina yakni Mindanao. Kolonialisasi berpindah tangan dari Spanyol ke AS menjelang perang dunia ke II. Perpindahan kolonialisasi menjadi nilai positif karena para Datus yang merupakan representasi pemimpin politik dan kebudayaan di Mindanao diberikan ruang untuk mempertahankan budaya Islam yang ada di Mindanao.

Pada tahun 1926 mulai terjadi konflik antara pemerintah AS dan penduduk Mindanao disebabkan oleh kebijakan AS yang menggabungkan pemerintah yang berada di Luzon dengan yang ada di Mindanao melalui kebijakan Bacon Bill. Kebijakan tersebut menuai protes dari masyarakat dan datus di Mindanao namun pemerintah AS tetap melaksanakan kebijakan tersebut

---

<sup>1</sup>Afghanistan, Aljazair, Chad, Guinea, Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Mesir, Niger, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Senegal, Sudan, Somalia, Tunisia, Turki, Yaman, Yordania, Bahrain, Oman, Qatar, Suriah, UAE, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Uganda, Burkina Faso, Kamerun, Komoro, Irak, Maladewa, Djibouti, Benin, Brunei, Nigeria, Azerbaijan, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Uzbekistan, Suriname, Togo, Guyana, Pantai Gading  
<sup>2</sup>[http://www.oic-oci.org/page/?p\\_id=52&p\\_ref=26&lan=en](http://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en) diakses tanggal 17 April 2018

dan Filipina merdeka dengan memasukkan wilayah Mindanao sebagai wilayah administratif dari negara Filipina. Kemerdekaan Filipina disambut baik oleh masyarakat Filipina kecuali wilayah Mindanao yang merasa tidak satu identitas dengan orang Luzon yang non Muslim. Hal ini menyebabkan konflik yang mulai terjadi pada 4 Juli 1946, yaitu terjadi konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Filipina yang ingin mengapus hukum-hukum Islam dan diganti dengan hukum yang berlaku di Filipina.

Konflik ini menimbulkan banyak penyerangan yang terjadi di Filipina Selatan, pada akhirnya terjadi penyerangan terhadap kantor pemerintah Filipina di Manila membuat pemerintah sakit hati dan tidak mau mengakui hukum adat di Mindanao. Sikap tersebut membuat Nur Misuari membentuk MNLF (Moro National Liberation Front) pada tahun 1969 sebagai kelompok pejuang di Mindanao. Kedekatan antara pendiri MNLF dengan pemimpin Libya yaitu Muammar Khadafi ketika itu membuat MNLF memiliki kekuatan dalam melakukan pemberontakan. Kelompok ini dibentuk sebagai gerakan masyarakat Mindanao untuk merdeka dan keluar dari Filipina yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami masyarakat Mindanao dalam hal politik dan ekonomi. Malaysia dan Libya merupakan negara pendukung MNLF dengan memberikan pelatihan kepada militan-militan dan dana kepada MNLF. (Abdullah & Sharon, 1989)

Tahun 1970-an merupakan periode paling kejam dalam perjuangan MNLF untuk Republik Bangsamoro dan konflik paling berdarah di wilayah Filipina sejak Perang Dunia II. Dalam empat tahun pertama sejak Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan darurat militer pada tahun 1972, ada 120.000 korban sipil dan militer. Selama periode yang sama, 100.000 Muslim melarikan diri dari wilayah Mindanao yang dilanda konflik untuk mencari perlindungan di negara tetangga Malaysia dan satu juta orang mengungsi secara internal. Pada tahun 1975, konflik antara pemerintah Filipina dan MNLF telah mencapai jalan buntu.

Dan kejadian tersebut merupakan awal mula konflik ini menjadi sorotan dunia internasional, pada tahun 1975 OKI yang terbentuk atas dasar solidaritas muslim mengakui bahwa MNLF adalah satu-satunya representatif umat muslim sehingga OKI memutuskan status observasi. Dengan bantuan OKI dan pemerintah Malaysia (Founding Father dari OKI) pemerintah Filipina melakukan perundingan perdamaian untuk pertama kalinya pada tahun 1975 dan dilanjutkan perjanjian perdamaian di Tripoli, Libya pada tahun 1976.

Pada masa pemerintah Cory Aquino dari tahun 1986-1992 menghasilkan perjanjian Jeddah Accord tahun 1987, Cory Aquino digantikan oleh Fidel Ramos (1992-1994) dimana Fidel Ramos kembali meneruskan negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF yang kembali menghasilkan perjanjian antara keduanya dan terjadi konsolidasi antara MNLF dan pemerintah Filipina yang menghasilkan final peace agreement (FPA).

Pasca FPA kondisi di Mindanao tidak lantas membaik belum genap 1 tahun disini Nur Misuari menyatakan kekecawaannya melakukan perundingan tersebut, karena terlalu banyak miscalculasi dan oportunisme dalam FPA. Terutama di tingkat masyarakat katolik karena Nur Misuari dianggap masyarakat katolik bekas pemberontak jika lantas memimpin maka dikhawatirkan akan melakukan kebijakan yang diskriminatif bahkan represif terhadap masyarakat katolik di Mindanao.

Setelah itu gagalnya FPA ditandai juga saat Fidel Ramos digantikan oleh Estrada. Proses perdamaian yang sudah digagas dan diperjuangkan oleh presiden sebelumnya justru tidak diteruskan dan tidak ditatai oleh presiden Estrada. Sikap all out war terhadap MNLF justru dibuat oleh Estrada. Pengakuan MNLF sebagai perwakilan Mindanao membuat MNLF diserang oleh

pemerintah Filipina, Estrada beranggapan bahwa untuk mencapai perdamaian abadi adalah dengan membantai semua MILF dan institusinya.

Setelah itu pada tahun 2007 konflik juga kembali terjadi antara penduduk muslim dan kristen di mindanao yang diakibatkan oleh perselisihan tanah antara kedua belah pihak tersebut, sehingga pemerintah filipina tidak bisa tinggal diam dan melakukan gencatan senjata terhadap konflik ini, tindakan ini memancing perlawanan dari penduduk muslim sekitar sehingga menyulut konflik terjadi kembali terulang lagi.

OKI melakukan upaya penuh dalam kejadian tersebut, OKI mengupayakan pertemuan tripartit antar kedua belah pihak pasca kejadian tersebut dimana pertemuan tersebut antara MILF, Pemerintah Filipina dan OKI. Pasca pertemuan tripartit yang diadakan beberap kali ini konflik juga tidak lantas mereda, pada tahun 2012 terjadi serangan bersenjata kembali di cotabato city dan membuat OKI terus melakukan upaya kembali untuk mencari perdamaian yang abadi antara kedua belah pihak ini sendiri.

Pada tahun 2015 menjadi sejarah terkelam di Mindanao dengan tewasnya 44 komando polisi yang bentrok dengan pemberontak di selatan Filipina.(BBC, 2015). Hal ini membuat OKI kembali bergerak dalam konflik ini, sebagai organisasi yang turut serta menjaga perdamaian di selatan Filipina OKI mengirimkan dutanya untuk perundingan dengan kedua belah pihak agar kejadian ini tidak berkepankangan.

Pada tahun 2017 OKI masih mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak karena OKI masih dianggap dunia Internasional dikarenakan keberhasilan menciptakan Final Peace Agreement. Pendekatan kepada kedua belah pihak dilakukan oleh OKI dimana OKI mengutus dutanya untuk berunding dengan presiden Duterte guna melaksanakan perundingan untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak dengan mengadakan sidang di Abidjan Pantai Gading tahun 2017. (cooperation, 2017)

## **Kerangka Teori**

Dari permasalahan yang akan di kaji, maka diperlukan teori dan konsep untuk menjawab permasalahan tersebut sekaligus dijadikan acuan sebagai landasan berfikir. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep yang dapat dijadikan sarana eksplanasi dan dasar bagi prediksi. Konsep yang diterapkan dalam penelitian ini yakni, konsep resolusi konflik

### **1. Global Governance**

Governance disini tidaklah sinonim dari government, memang keduanya merujuk pada perilaku yang terarah, aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tertentu dan adanya seperangkat aturan tertentu. Government memiliki wewenang untuk memastikan implementasi kebijakannya terlaksana, sedang governance, sisi lain merujuk pada aktivitas yang berlandaskan tujuan atau kepentingan bersama yang bisa saja namun tidak selalu bersumber pada tanggung jawab legal formal, dan tidak bergantung pada keharusan adanya kekuasaan/otoritas, baik untuk memastikan pemenuhannya, ataupun untuk menyelesaikan pertentangan yang timbul dalam pelaksanaannya. Governance dengan demikian, merupakan fenomena yang lebih luas dan kompleks dari government sebab ia melingkupi intuisi pemerintah, dan di sisi lain juga melibatkan mekanisme informal/non-pemerintah, yang mana didalamnya individu dan organisasi bersama-sama bekerja mencapai tujuannya.(Margaret P. Karns, 2004)

Menurut Rosenau Global Governance adalah sebuah gerakan yang berusaha mengintegritaskan para aktor transnasional dengan tujuan untuk mengambil keputusan

atau menyelesaikan suatu masalah. (Rosenau, 1992). Munculnya konsep global governance dalam diskursus hubungan internasional merupakan respons dari semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia serta menguatnya aktor-aktor baru (non-state) yang menawarkan peran yang lebih beragam. Terkait persoalan dan ancaman yang dihadapi umat manusia dalam dunia internasional, setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi kepedulian global governance, yakni persoalan keamanan dan persoalan ekonomi.

Konsepsi terhadap keamanan kini terus berkembang lebih kompleks dari sebelumnya, tidak lagi semata-mata ancaman dari negara lain tetapi ancaman tentang konsepsi keamanan menjadi lebih beragam seperti ancaman dari entitas terkecil seperti kelompok dan individu, konsep keamanan saat ini juga sudah berkembang dari pemahaman akan keamanan tradisional yang lebih menekankan ancaman terhadap negara melalui kekuatan militer dan senjata, ke konsep keamanan non-tradisional yang bertumpu pada keamanan secara luas yang dihadapi manusia. Oleh karena itu penanganan keamanan tidak hanya negara yang mendominasi penyelesaian masalah, namun aktor-aktor lain di luar negara juga memiliki posisi yang sama pentingnya.

Disini OKI hadir sebagai Global Governance yang mana dalam konteks ini OKI hadir menjadi pihak non-state yang terlibat di dalam konflik antara pemerintah Filipina dan suku Moro, disini OKI muncul sebagai tata kelola global yang menaungi negara-negara Islam dan juga fokus pada masalah-masalah yang terjadi pada dunia Islam untuk memberikan solusi untuk menangani masalah yang sedang terjadi.

## **2. Konsep Resolusi Konflik**

Konflik adalah dinamika yang sering terjadi di dalam Hubungan Internasional, biasanya konflik muncul dikarenakan tidak tercapainya kepentingan salah pihak dalam sebuah negosiasi. Akhirnya konsep resolusi ini dianggap konsep yang paling tepat untuk menganalisa studi kasus ini. Resolusi Konflik adalah upaya menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara pihak-pihak yang mengalami konflik. (Simon Fisher, 2001)

Banyak versi tentang resolusi konflik, banyak pula sudut pandang dalam resolusi konflik tersebut karena setiap expert memiliki pandangannya terhadap resolusi konflik tersebut, seperti contoh seorang budayawan dan seorang ahli ekonomi memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memecahkan konflik yang terjadi. Point yang terpenting adalah banyak kemungkinan perbedaan versi dalam teori konflik dan bermacam-macam perbedaan dalam teori tentang konflik, namun ada perbedaan penting dalam terminologi dan fokusnya, tetapi dalam setiap teori resolusi konflik point utamanya adalah mengkonseptualisasi bagaimana konflik sosial pada manusia bisa terpecahkan.

Dalam menyediakan bantuan untuk menjelaskan keberagaman tentang konflik sosial kita dapat mengelompokkan hal tersebut dalam beberapa tipe yang mana beberapa tipe memiliki sudut pandang yang fundamental, meskipun banyak teori yang dikembangkan tentang resolusi dalam mengidentifikasinya kita tetap harus memperhatikan beberapa factor utama dalam mengidentifikasinya yakni:

1. *Individual characteristics theories* melihat konflik sosial dengan sifat bawaan dari setiap individu yang terlibat.
2. *Social process theories* melihat bahwa konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial baik individu maupun kelompok, karena pada setiap interaksi

yang terjadi disitu juga konflik muncul. Selain itu juga untuk *mengeneralisasikan* sifat dari dari proses ini.

3. *Social structural theories* melihat bahwa konflik adalah produk yang tercipta dari terbentuknya masyarakat.
4. *Formal theories* mencari untuk memahami bahwa konflik yang terjadi pada manusia secara logis dan dalam hitungan matematika. Teori ini memperhatikan angka-angka yang berpengaruh seperti jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan sebagainya untuk membuktikan darimana konflik itu muncul sehingga dapat disimpulkan resolusi konflik yang tepat dari hasil yang ditemukan. (Schellenberg, 1996, p. 13)

Selain dari ilmuwan Agama Islam juga menaruh perhatian khusus pada resolusi konflik ini sendiri. Karena pada hakikatnya sejarah menunjukkan bahwa Islam terlahir pada kondisi konflik yang sangat akut di tingkat local maupun Internasional. Dengan demikian mejadi teramat penting untuk menggali kembali struktur nilai Islam yang sangat apresiatif dengan semangat “kedamaian, keselamatan, pasrah, tunduk” yang tertera pada kata Islam itu sendiri. Banyak sekali ayat al-Qur’an yang memberikan informasi untuk menyelesaikan konflik secara damai, bahkan Rasulullah SAW juga sudah memberikan banyak contoh, bahwa dia selama masa menyebarkan agama Islam banyak di Dzalimi banyak pihak namun beliau tetap tidak melakukan tindakan kekerasan bahkan beliau menyikapi dengan tenang dan tidak menjadikan musuh orang atau golongan yang telah mendzaliminya. Karena dalam Islam juga diajarkan sekalipun kita berhadapan dengan pihak yang dzalim, kita tetap diperintahkan untuk tetap berlaku adil<sup>3</sup>

Dalam resolusi konflik ada 5 pendekatan utama yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi dan untuk memecahkan konflik tersebut sendiri, bentuk-bentuk pendekatannya adalah sebagai berikut:

1. *Coercion*, memaksa atau menekan salah satu pihak yang terlibat konflik untuk mendapatkan keputusan tertentu.
2. *Negotiation and bargaining*, atau melibatkan pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah yang mana pihak yang berkonflik juga membuat perjanjian sehingga timbul hasil akhir yang disepakati kedua belah pihak.
3. *Adjudication*, atau dengan menggunakan kekuasaan negara dan itu merupakan system yang legal untuk menentukan sebuah keputusan.
4. *Mediation*, menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik dan juga membuat perdamaian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
5. *arbitration*, penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari pihak pihak yang bersengkata terkait masalah yang mereka sengkatakan. (Schellenberg, 1996, p. 13)

Dalam studi kasus ini OKI berperan sebagai mediator dalam konflik Moro Mindanao Filipina Selatan. Dimana kita disini *mediasi* adalah proses perdamaian dengan menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik dan juga membuat perdamaian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Menjadi mediator dalam konflik juga mempunyai harus memperhatikan syarat –syarat tertentu :

---

<sup>3</sup> (QS. 5:8)

1. Mediator berperan memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang kesulitan menemukan jalan tengah untuk mencapai perdamaian.
2. Mediator harus berasal dari pihak yang netral tidak berpihak pada kubu manapun, mediator juga harus mengarahkan pihak-pihak menuju kesepakatan
3. Mediasi bersifat sukarela: meski terkadang mediasi adalah perintah pengadilan (dalam hal ini tidak bersifat sukarela) tetapi melanjutkan mediasi bersifat sukarela bagi pihak yang bersengketa, dan tidak ada kesepakatan yang tidak diraih secara bersama.
4. Pihak yang bersengketa tetap bertanggung jawab : mediator bias mengarahkan negosiasi, tetapi tanggung jawab atas segala macam keputusan berada di tangan pihak yang bersengketa
5. Mediasi bersifat pribadi dan rahasia : apa yang terjadi pada proses tidak untuk dibagikan kepada orang lain. Proses mediasi diadakan di tempat pribadi dan tidak ada catatan khusus dan resmi tentang apa yang di diskusikan.(Schellenberg, 1996)

Dalam studi kasus ini OKI berperan sebagai mediator dalam konflik Moro Mindanao Filipina Selatan. Dimana kita disini *mediasi* adalah proses perdamaian dengan menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik dan juga membuat perdamaian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Menjadi mediator dalam konflik juga mempunyai harus memperhatikan syarat –syarat tertentu :

1. Mediator berperan memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang kesulitan menemukan jalan tengah untuk mencapai perdamaian.
2. Mediator harus berasal dari pihak yang netral tidak berpihak pada kubu manapun, mediator juga harus mengarahkan pihak-pihak menuju kesepakatan
3. Mediasi bersifat sukarela
4. Pihak yang bersangkutan tetap bertanggung jawab : mediator bias mengarahkan negosiasi. Tetapi tanggung jawab tetap atas segala keputusan tetap ditangan pihak yang bersengketa.
5. Mediasi bersifat rahasia : tidak untuk disampaikan kepada pihak lain.

Konsep resolusi konflik disini sangat relvan mengingat OKI disini selalu berupaya memberikan solusi-solusi perdamaian sejak Presiden Ferdinand Marcos yang menjabat tahun 1971-1986 pernah mecapai kesepakatan dengan pihak Mindanao yaitu melalui perjanjian Tripoli tahun 1976 di Libya yang merupakan hasil dari negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Pemimpin Libya ketika itu Muammar Khadafi serta OKI menjadi mediator. Perjanjian ini mengalami kegagalan setelah pemerintah Filipina dianggap tidak mengakui atau mentaati isi perjanjian.

Pada masa pemerintah Cory Aquino dari tahun 1986-1992 menghasilkan perjanjian Jeddah Accord tahun 1987, Cory Aquino digantikan oleh Fidel Ramos (1992-1994) dimana Fidel Ramos kembali meneruskan negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF yang kembali menghasilkan perjanjian antara keduanya dan terjadi konsolidasi antara MNLF dan pemerintah Filipina yang menghasilkan final peace agreement (FPA). Fidel Ramos digantikan oleh Estrada. Proses perdamaian yang sudah digagas dan diperjuangkan oleh presiden sebelumnya justru tidak diteruskan dan tidak ditatai oleh presiden Estrada. Sikap all out war terhadap MILF justru dibuat oleh Estrada. Pengakuan MNLF sebagai perwakilan Mindanao membuat MILF diserang oleh



pemerintah Filipina, pembantaian Jbidah menewaskan 60 orang Muslim Mindanao. Hal tersebut mebuat MILF mencari bantuan dari masyarakat Internasional.<sup>4</sup> Dan ditahun 2017 ini OKI melakukan upaya kembali menjadi fasilitator dalam konflik ini.

## **Hipotesa**

1. Konflik antara pemerintah Filipina dengan suku Moro merupakan konflik berkelanjutan sehingga sudah menjadi isu global dan OKI hadir sebagai Global Governance untuk memberikan solusi dari konflik tersebut.
2. OKI menjadi mediator berperan memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang kesulitan menemukan jalan tengah untuk mencapai perdamaian. Disini jelas OKI turutan memfasilitasi perundingan ke 2 belah pihak antara pemerintah Filipina dan suku Moro

## **Peran OKI Dalam Menangani Konflik Moro**

### **A. OKI Sebagai Global Governance Dalam Konflik Moro**

Menurut Rosenau Global Governance adalah sebuah gerakan yang berusaha mengintegritaskan para aktor transnasional dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. (Rosenau, 1992). Munculnya konsep global governance dalam diskursus hubungan internasional merupakan respons dari semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia serta menguatnya aktor-aktor baru (non-state) yang menawarkan peran yang lebih beragam. Terkait persoalan dan ancaman yang menghadapi umat manusia dalam dunia internasional, setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi kepeduliam global governance, yakni perosalan keamanan dan persoalan ekonomi. Disini OKI hadir sebagai Global Governance yang mana dalam konteks ini OKI hadir menjadi pihak non-state yang terlibat di dalam konflik antara pemerintah filipina dan suku moro, disini OKI muncul sebagai tata kelola global yang menaungi negara-negara Islam dan juga fokus pada masalah-masalah yang terjadi pada dunia Islam untuk memberikan solusi untuk menangani masalah yang sedang terjadi.

Tahun 1970-an merupakan periode paling kejam dalam perjuangan MNLF untuk Republik Bangsamoro dan konflik paling berdarah di wilayah Filipina sejak Perang Dunia II. Dalam empat tahun pertama sejak Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan darurat militer pada tahun 1972, ada 120.000 korban sipil dan militer. Selama periode yang sama, 100.000 Muslim melarikan diri dari wilayah Mindanao yang dilanda konflik untuk mencari perlindungan di negara tetangga Malaysia dan satu juta orang mengungsi secara internal. Pada tahun 1975, konflik antara pemerintah Filipina dan MNLF telah mencapai jalan buntu.

Dan kejadian tersebut merupakan awal mula konflik ini menjadi sorotan dunia internasional, pada tahun 1975 OKI yang terbentuk atas dasar solidaritas muslim mengakui bahwa MNLF adalah satu-satunya representatif umat muslim sehingga OKI memutuskan status observasi. Dengan bantuan OKI dan pemerintah Malaysia (Founding Father dari OKI) pemerintah Fillipina melakukan perundingan perdamaian untuk pertama kalinya pada tahun 1975 dan dilanjutkan perjanjian perdamaian di Tripoli, Libya pada tahun 1976.

---

<sup>4</sup> Surwandono, dinamika penyebab konflik di Mindanao.

(<http://surwandono.staff.ummy.ac.id/2010/07/13/dinamika-penyebab-konflik-mindanao/>)

Di sisi lain OKI disini muncul bukan karena hanya solidaritas sesama umat muslim melainkan konflik Mindanao juga diintervensi oleh pihak luar yang mencari kesempatan dalam konflik ini. tindakan suku Moro dianggap oleh beberapa pihak di dunia Internasional sebagai separatisme Islam, seperti contohnya Amerika Serikat langsung mengintervensi konflik ini dengan berpihak pada Pemerintahan Filipina karena Suku Moro sendiri dianggap sebagai separatisme. diskursus separatisme dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep legitimasi atau kekuasaan terhadap pemerintah yang berkuasa. pemikiran tersebut sudah lama dikembangkan oleh pemikir-pemikir Islam klasik seperti al-Ghazali, al-Mawardi, ataupun Ibn Taimiyyah. (Surwandono & Ahmadi, 2011)

Pasca Final Peace Agreement tahun 1996 konflik di Moro terus mengalami dinamika dan tidak stabil. Dikarenakan gejolak Konflik yang tidak kunjung reda OKI menaruh perhatian khusus pada konflik ini bahkan menteri luar negeri OKI fokus penuh dengan selalu mengadakan Konferensi Para Menteri Luar Negeri (KTM). Pertemuan ini bertujuan untuk memeriksa dan menguji hasil-hasil yang telah dicapai dari implementasi atas kebijakan-kebijakan yang di ambil dari KTT sebelumnya.

Dalam kurun waktu 2015-2017 kementerian luar negeri OKI berupaya keras menemukan titik terang perdamaian kedua belah pihak. pada tahun 2015 Sekretaris Jenderal OKI Mengadakan Pertemuan Ekstensif dengan Pejabat Pemerintah Filipina dan Dua Front Moro yakni MNLF dan MILF. Sekretaris Jenderal OKI juga meninjau situasi proses perdamaian dengan Duta Negara Anggota OKI yang ditempatkan di Manila selama makan malam yang diselenggarakan oleh Duta Besar Arab Saudi pada saat itu, Dr. Abdullah Al-Bussairy. kunjungan pertama oleh Sekjen OKI ke wilayah tersebut, untuk bertemu dengan dua kelompok Muslim utama yang memimpin perjuangan untuk otonomi selama lima dekade terakhir, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). (oic-oci.org, 2015)

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa konflik di Moro sudah menjadi isu penting dalam dunia Islam pasca awal mula OKI terlibat menjadi pihak ketiga di tahun 1976 yang menghasilkan Tripoli Agreement. Disini OKI sebagai Organisasi representatif umat muslim dunia dan memangku solidaritas beragama antar umat muslim terus berupaya penuh walaupun juga OKI sudah melakukan berkali-kali perundingan perdamaian dalam konflik ini tidak lantas lepas tangan. Upaya final OKI sebagai global governance juga disini dilanjutkan dengan memfasilitasi sidang pada tahun 2017 sebagai mediator antara pihak pemerintah dan suku Moro itu sendiri.

## **B. Upaya OKI sebelum sidang di Abidjan, Pantai Gading (2015-2016)**

Konflik Moro ini sudah berangsur sejak lama, pasca Final Peace Agreement tahun 1996 yang berhasil dibuat oleh OKI dan dengan bantuan dunia Internasional konflik ini masih berkepanjangan hingga tahun 2015. OKI sebagai organisasi yang menjaga perdamaian dunia dan juga menjaga solidaritas umat muslim terus memantau dan menjaga perdamaian di Filipina selatan, Melihat gejolak konflik yang terjadi di Filipina sebagai organisasi internasional yang pernah turun langsung di perundingan perdamaian sebelumnya tidak hanya bisa tinggal diam, OKI melakukan upaya-upaya menyelesaikan konflik salah satunya adalah pada tahun 2015 Sekretaris Jenderal OKI Mengadakan Pertemuan Ekstensif dengan Pejabat Pemerintah Filipina dan Dua Front Moro yakni MNLF dan MILF. Sekretaris Jenderal OKI juga meninjau situasi proses perdamaian dengan Duta Negara Anggota OKI yang ditempatkan di Manila selama makan malam

yang diselenggarakan oleh Duta Besar Arab Saudi pada saat itu, Dr. Abdullah Al-Bussairy. kunjungan pertama oleh Sekjen OKI ke wilayah tersebut, untuk bertemu dengan dua kelompok Muslim utama yang memimpin perjuangan untuk otonomi selama lima dekade terakhir, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Kunjungannya ke Mindanao sangat dihargai oleh dua kelompok yang datang dari berbagai daerah untuk bertemu dengannya. Sekretaris Jenderal bertemu dengan masing-masing kelompok secara terpisah pada hari Sabtu dan Minggu untuk membawa pandangan dan harapan dari kedua belah pihak lebih dekat. Sekretaris Jenderal menekankan pada kebutuhan untuk persatuan, kesepakatan dan pertimbangan peran dan pentingnya setiap kelompok untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran di wilayah tersebut. Madani kemudian memimpin pertemuan Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF), yang diaktifkan tahun lalu dan bergabung dengan dua front Moro untuk bekerja sama. Kedua belah pihak sepakat bahwa Forum adalah mekanisme terbaik untuk diskusi dan pertukaran informasi, dan mereka setuju untuk terus mengerahkan upaya mereka untuk kepentingan proses perdamaian. (oic-oci.org, 2015)

Di hari selanjutnya sekjen OKI Iyad Ameen Madani mengadakan pertemuan dengan Presiden Filipina Benigno S. Aquino III, Senin, 20 April 2015, di Istana Presiden di ibukota Manila. Guna membahas kelanjutan proses perdamaian di Filipina Selatan. Presiden menegaskan kembali komitmennya demi keberhasilan dan dukungannya terhadap Undang-Undang Dasar Bangsamoro, yang menguraikan aturan otonomi di selatan. Sekretaris Jenderal OKI menekankan posisi OKI dalam mendukung proses perdamaian dan Forum Koordinasi Bangsamoro sebagai mekanisme untuk diskusi dan pertukaran informasi antara MNLF dan MILF, serta penghormatan penuh terhadap integritas teritorial dan jua kedaulatan dari Republik Filipina.

Upaya terus dilanjutkan OKI sebagai mediator dalam konflik ini tidak berhenti pada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh OKI terhadap pihak yang terlibat konflik, OKI melakukan upaya lanjutan dengan mengadakan sidang tripartit di Filipina. Sekjen OKI mengirimkan dutanya El-Masry, dimana Selama konsultasi informal, ketiga pihak menyetujui sebuah agenda draf termasuk penjelasan singkat oleh perwakilan pemerintah mengenai situasi saat ini mengenai RUU otonomi dan diskusi tentang masalah yang tertunda, termasuk konvergensi perjanjian sebelumnya dengan undang-undang otonomi. Proses Persiapan Perdamaian Tripartit berlangsung selama dua hari pada tanggal 7-8 September 2015 di Manila, Filipina antara Organisasi Kerjasama Islam, Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro menyimpulkan telah menyetujui agenda dan isu-isu substantif yang akan dibahas di depan Pertemuan Tingkat Menteri Tripartit yang akan diadakan di Jeddah pada bulan November 2015. OKI telah mempertahankan komitmennya terhadap Tinjauan Tripartit sejak dimulai pada tahun 2007 yang telah berpengaruh pada pembentukan proses-proses penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bangsamoro. Selama rapat Tripartit berlangsung, partai-partai dapat mendiskusikan kembali diskusi tentang Dana Bantuan Pembangunan Bangsamoro yang membahas kebutuhan sosial-ekonomi Rakyat Bangsamoro, yang merupakan proses untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan yang dicapai selama peninjauan tripartit. Pertemuan itu juga diberi pengarah tentang status Dasar Hukum Bangsamoro saat ini dalam Kongres oleh perwakilan Pemerintah Filipina dan mengadakan diskusi mengenai mekanisme untuk membawa kedua jalur perdamaian bersama. Tujuan akhir dari pertemuan Tripartit adalah untuk menetapkan jalan bagi implementasi perjanjian

perdamaian sebelumnya Perjanjian Damai Tripoli 1976 dan Final Peace Agreement 1996. Selama sidang Tripartit, para pihak menyepakati sejumlah masalah umum. Sehubungan dengan Dana Bantuan Pembangunan Bangsamoro, pertemuan tersebut setuju untuk meninjau kembali kesepakatan dan pemahaman tentang implementasi Dana Bantuan Pembangunan Bangsamoro. Para pihak juga setuju untuk menindaklanjuti dengan Bank Pembangunan Islam tentang Kerangka Acuan (TOR) dari Dana Bantuan Pembangunan Bangsamoro. Pertemuan tersebut juga menyetujui untuk meninjau kembali kesepakatan tentang Komite Pelaksanaan dan Pengawasan Tripartit (TIMC). Sesuai dengan Kerangka Acuan yang diusulkan, TIMC akan bertemu dan memantau pelaksanaan semua perjanjian Proses Implementasi Tripartit., pertemuan sepakat untuk melihat Perjanjian Interim tentang Co-management yang ditandatangani dalam dokumen selama Pertemuan Tingkat Tinggi Ad Hoc pada tanggal 1-2 Maret 2012. Kedua pihak, (GPH dan MNLF) berkomitmen untuk bekerja dengan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) dan Daerah Otonom di Muslim Mindanao (ARMM) tentang status saat ini pengaturan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Interim dan menyerahkan rekomendasi tentang cara memperkuat yang sama. Pertemuan tersebut juga menyetujui untuk memeriksa ketentuan Dasar Hukum Bangsamoro yang relevan dengan pengelolaan bersama.

Selanjutnya pada tahun 2016 Utusan Khusus OKI dalam, Proses Perdamaian di Filipina Selatan, Duta Besar Sayed Kassem Elmasry, didampingi oleh perwakilan dari Departemen Minoritas dan Komunitas Muslim, mengakhiri kunjungan resmi empat hari di Filipina. Tujuan dari misi ini adalah untuk terlibat dalam pembicaraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perdamaian untuk menindaklanjuti perkembangan terakhir di lapangan.

Delegasi OKI bertemu dengan Sekretaris presiden Filipina Jesus Dureza sekaligus penasihat Presiden pada proses perdamaian untuk menerima pengarahan mengenai rencana Pemerintah untuk federalisme dan pemetaan baru guna menuju perdamaian. Pada pembukaan pertemuan, Sekretaris Dureza menguraikan rencana pemerintah untuk menyatukan elemen-elemen kunci dari semua perjanjian internasional sebelumnya menjadi satu undang-undang yang memungkinkan yang akan disahkan untuk kepentingan semua pihak. Dureza menekankan pentingnya peran lanjutan dari OKI sebagai mitra penting dalam proses perdamaian dan dia memuji pencapaian OKI, khususnya, pembentukan Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF).

Delegasi OIC mencatat dukungan kuat untuk proses perdamaian dan memuji upaya Filipina untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi di Mindanao dengan bekerja untuk konvergensi dari dua jalur perdamaian. Dureza mencatat bahwa Filipina berdedikasi dan berkomitmen penuh untuk proses ini.

Delegasi OKI mengadakan pembicaraan terpisah dengan front Moro, yaitu Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) untuk memastikan pandangan mereka tentang proses perdamaian. Dan menegaskan kembali bahwa Bangsamoro Coordination Forum (BCF) adalah tempat utama bagi MNLF dan MILF untuk merapatkan barisan, memperkuat dan mengkonsolidasikan kerjasama dan persatuan mereka dan mempertahankan perjuangan damai mereka untuk tujuan bersama.

### **C. Upaya OKI menjadi mediator sidang perdamaian konflik Moro di Abidjan tahun 2017**

Sebagai upaya lanjutan OKI dalam menyelesaikan konflik ini OKI mengadakan sidang guna menetapkan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik. Sidang ini merupakan sidang rancangan deputi luar negeri OKI yang mana dalam sidang ini menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik perwakilan dari pemerintah Filipina dan perwakilan dari Bangsamoro. Pada sidang yang diadakan di Abidjan, Pantai Gading 10-11 Juli 2017 Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Youssef Al Othaimen, menyambut baik posisi kooperatif dan akomodatif yang dinyatakan oleh Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) bahwa ia tidak akan lagi mengajukan rancangan undang-undang otonomi baru untuk menghindari komplikasi dan akan berkontribusi secara langsung. untuk federalisme di selatan filipinja.

Di sisi lain, untuk mendukung proses perdamaian, Sekretaris Jenderal OKI menyelenggarakan Sidang ke-4 Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF) pada tanggal 11 Juli 2017 di Abidjan, Pantai Gading pada margin Sesi ke-44 Dewan Menteri Luar Negeri (CFM). Duta Besar Sayed El-Masry, Sekjen OKI, Peace Envoy di Filipina selatan memimpin pertemuan, dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) diwakili. OKI terus berurusan dengan MNLF melalui formula Jeddah di bawah kepemimpinan Profesor Nur Misuari, bapak pendiri MNLF

Agenda pertemuan membahas prospek proses perdamaian setelah satu tahun pemerintahan Duterte dan pendekatan baru terhadap pertanyaan Bangsamoro; konvergensi dari dua jalur perdamaian tanpa mengorbankan komitmen dan kewajiban apa pun yang terkandung dalam semua perjanjian damai; prinsip-prinsip yang memandu perluasan BCF dan situasi saat ini di Marawi.

Pertemuan ini berkenalan dengan isi UU Dasar Bangsamoro yang baru, khususnya, pendekatannya mengenai tiga isu yang tersisa, yaitu wilayah, referendum dan pembagian mineral .

Pertemuan mencatat khususnya bahwa klausul di proposal baru termasuk wilayah sebagaimana diatur dalam Perjanjian 1976 Tripoli dan Final Peace Agreement 1996, dan selanjutnya menyambut adopsi dari klausul yang disepakati selama sidang Tripartit.

Penyelenggaraan pertemuan BCF adalah bagian dari upaya OKI untuk merapatkan barisan antara front pembebasan Moro dan untuk membantu dalam proses menggabungkan dua jalur perdamaian dan untuk mengkonsolidasikan realisasi hak-hak minoritas Muslim yang tidak dapat dicabut di selatan. Filipina untuk penyelesaian masalah mereka yang damai, adil dan tahan lama.

Menteri Luar Negeri OKI, menegaskan kembali pentingnya persatuan dalam MNLF dan formula Jeddah yang tercermin dalam resolusi yang diadopsi selama Sesi Menteri. Atas undangan dari Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam, dan dalam pelaksanaan resolusi dari Dewan Menteri Luar Negeri OKI mengenai pertanyaan kaum Muslim di Filipina Selatan, sebuah Sesi Konsultasi dari Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF) diadakan di Markas Besar OKI di Jeddah pada 8 Mei 2017. Duta Besar Sayed El-Masry, Sekjen OKI Perdamaian untuk Filipina Selatan, memimpin pertemuan. Undangan dikeluarkan sesuai dengan formula yang disepakati yang dikenal sebagai formula Jeddah.

BCF didirikan oleh OKI pada tanggal 18 Mei 2010 setelah mendapatkan persetujuan dari kedua profesor NurMisuari, Ketua Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Hajj Murad Ibrahim, Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF) untuk membangun mekanisme untuk koordinasi antara dua front untuk mengkonsolidasikan gerakan mereka ke arah mencapai aspirasi rakyat Bangsamoro untuk resolusi damai yang adil dan abadi terhadap masalah mereka.

Dewan Menteri Luar Negeri OKI (CFM) meminta BCF untuk membahas cara dan sarana untuk menemukan kesamaan antara Perjanjian Perdamaian Tripoli 1976, Perjanjian Damai Jakarta 1996 dan Perjanjian Komprehensif Bangsamoro (CAB) untuk menyelaraskan dua jalur perdamaian dan mempertahankan keuntungan yang terkandung dalam perjanjian ini yang MNLF dan MILF saling kenal dan hormati. Perlu diingat bahwa OKI selalu menyatakan bahwa Perjanjian Tripoli 1976 dan Perjanjian Jakarta 1996 terus merumuskan dasar bagi penyelesaian konflik.

Ini telah menjadi kebutuhan mendesak saat ini untuk merumuskan proposal yang tepat untuk mencapai tujuan ini mengingat prakarsa-prakarsa baru dari pemerintahan Filipina saat ini untuk menemukan solusi utama terhadap masalah inkonstitusionalitas yang telah menghadapi perjanjian damai selama empat puluh tahun terakhir.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta saling bertukar pandangan tentang perkembangan terakhir, khususnya, mengenai kerja Dewan Transisi Bangsamoro (BTC) yang dipercayakan dengan menyusun undang-undang dasar untuk daerah otonom. Pertemuan tersebut mengambil sikap yang kuat terhadap upaya apa pun untuk menghasilkan versi rancangan undang-undang yang dilemahkan selama tinjauan kongres.

Pertemuan tersebut juga membahas perluasan BCF untuk memasukkan pemangku kepentingan lainnya termasuk organisasi masyarakat sipil Bangsamoro dan kualifikasi untuk keanggotaan. Pertemuan tersebut memutuskan untuk mengadopsi pendekatan inkremental dan inklusif terhadap pertanyaan memperkuat dan memperbesar BCF.

Anggota BCF menyambut janji Presiden Duterte dari Filipina untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap ketua Misuari dan mengembalikan kebebasannya. Utusan Khusus OKI untuk Proses Perdamaian di Filipina Selatan dan Ketua BCF, Amb Sayed El-Masry menyatakan bahwa “OKI selalu menyatakan bahwa Ketua Misuari sangat diperlukan untuk proses perdamaian menambahkan bahwa kami diyakinkan oleh Otorita Filipina bahwa mereka akan bekerja untuk menghilangkan hambatan apa pun atas partisipasinya dalam proses perdamaian.” Dia menyatakan harapan bahwa dia akan dapat menghadiri sesi formal berikutnya dari BCF di Abidjan pada margin pertemuan CFM dari tanggal 10 - 11 Juli 2017 puncak dari segala pertemuan yang dilakukan OKI di tahun 2017 adalah sidang di Abidjan, Pantai Gading ini dilaksanakan pada tanggal 10-11 Juli 2017 yang mana sidang itu tidak hanya dihadiri oleh pihak yang berkonflik tetapi tetap ada tinjauan dari pihak lain seperti Arab Saudi dan Indonesia. .

Sidang di Abidjan berlangsung lancar dimana dari sidang itu lahir beberapa gagasan

1. OKI menekankan kepada kedua belah pihak untuk menghormati perjanjian Tripoli 1976 dan Final Peace Agreement sebagai dasar resolusi konflik yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni antara pemerintah Filipina itu sendiri dan pihak MNLF
2. Menegaskan kembali bahwa Comprehensive Agreement (CBA) Bangsamoro juga merupakan pemenuhan persyaratan mewujudkan perdamaian di Mindanao, dan juga merupakan langkah besar untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Mindanao
3. OKI menyambut inisiatif pemerintah untuk mencari solusi unkonstitusional yang telah dihadapi dalam upaya mencapai perdamaian selama kurun waktu 40 tahun ini.
4. OKI menyarankan bahwa dasar hukum Bangsamoro di sahkan dibawah hukum pemerintah Filipina dan bangsa Moro diberi otonom sendiri.
5. OKI menyatakan bahwa pemerintah harus bekerjasama dengan MILF dan MNLF untuk mengadopsi segala kebaikan yang ada di perjanjian Tripoli 1978 dan Final Peace Agreement guna membentuk otonom Bangsamoro.

Sidang ini mendapatkan hasil yang positif pihak luar juga banyak yang mendukung perdamaian tercipta di selatan Filipina. Karena konflik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini tidak selesai-selesai, jika tidak cepat selesai konflik ini hanya akan selalu memakan korban dan ,menjadi sorotan dunia Internasional

Para anggota BCF mengucapkan terima kasih kepada OKI dan sekjen PBB atas dukungannya yang berkelanjutan, dan menegaskan kembali janji mereka bahwa mereka terus bekerja sama dengan OKI dan di antara mereka sendiri untuk memenuhi aspirasi rakyat Bangsamoro.